

Implementasi Akuntansi Sektor Publik pada Pengelolaan Keuangan Disdukcapil Kabupaten Bantul

Alfina Puspita Ningrum¹, Aprilia Utami Marsudi²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

e-mail: alfinapuspita643@gmail.com

Abstrak

Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai organisasi perangkat daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang berkaitan langsung dengan hak sipil masyarakat. Oleh karena itu, penerapan akuntansi sektor publik pada Disdukcapil menjadi topik yang penting untuk dikaji guna menilai bagaimana pengelolaan keuangan mendukung kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak terkait. Fokus penelitian ini meliputi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Bantul telah menerapkan SAP berbasis akrual dan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan dana yang tertib dan akuntabel terbukti mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang baik berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Kata kunci: akuntansi sektor publik, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, Disdukcapil

Abstract

Public sector accounting plays an important role in supporting good governance, particularly in financial management and the provision of public services. The Population and Civil Registration Agency (Disdukcapil) as a regional organization has a strategic responsibility in providing population administration services that are directly related to the civil rights of the community. Therefore, the application of public sector accounting at Disdukcapil is an important topic to study in order to assess how financial management supports the quality of public services. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews with related parties. The focus of this study includes the application of accrual-based Public Sector Accounting Standards Government Accounting Standards (SAP) based on accrual, financial recording and reporting systems, as well as the principles of accountability and transparency. The results of the study show that the Disdukcapil of Bantul Regency has implemented accrual-based SAP and utilizes the Local Government Information System (SIPD) in financial management. Orderly and accountable fund management has been proven to support the effectiveness and efficiency of public services. These findings confirm that the implementation of good public sector accounting plays an important role in improving the quality of population administration services.

Keywords: public sector accounting, financial management, public services, Disdukcapil

1. PENDAHULUAN

Sektor publik sangat penting dalam melaksanakan pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Di sini, akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat utama untuk mewujudkan tata kelola yang baik, mencakup transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan efisiensi. Khususnya di tingkat pemerintahan daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan lembaga penting yang berfungsi sebagai penyedia layanan administrasi kependudukan kepada warga negara.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mendukung Bupati dalam melaksanakan fungsinya yang terkait dengan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil. Dalam melaksanakan fungsi ini, dinas mengelola sejumlah program dan kegiatan yang memerlukan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penerapan akuntansi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bukan sekedar tentang pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga bagaimana alokasi keuangan dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini terbukti dari berbagai inovasi yang sudah dilakukan dan dikembangkan, antara lain: Bantul Smart Dukcapil, 30-Menit Sapa SITUPAT, CEKATAN, AKSI SIMPATI, dan AKSI MESRA. Layanan ini telah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah diakses, dan berkualitas lebih tinggi kepada masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akuntansi sektor publik diterapkan dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan langkah yang diambil dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam memperoleh informasi pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan segala sesuatunya secara akurat, sehingga untuk memperoleh data, penulis melakukan interview dengan dua informan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul Ibu CH Siwi Budi Astuti, SE, serta Bapak Wasis Basuki, S.Sos, MM. Pembicaraan ini mengarah pada perumusan masalah dan mencakup penerapan akuntansi untuk pos-pos anggaran pada lini pelayanan publik, strategi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, siklus audit, dualisme pada pengelolaan pelayanan, dan upaya perbaikan serta pengadaan dalam pengelolaan pelayanan publik.



Gambar 1. Proses Wawancara Bersama Ibu CH Siwi Budi Astuti, SE



Gambar 2. Proses Wawancara Bersama Bapak Wasis Basuki, S.Sos, MM

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tugas dan Fungsi Utama Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Disdukcapil Kabupaten Bantul memberikan bantuan kepada Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Disdukcapil menyusun kebijakan teknis, melaksanakan bidang itu kebijakan, mengawasi dan mengevaluasi dengan pelaporan, mengelola administrasi sehari-hari, serta melaksanakan urusan dan tugas tambahan lain yang didelegasikan oleh Bupati.

3.2 Pelayanan Publik Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Disdukcapil Kabupaten Bantul juga menyediakan layanan administrasi kependudukan lainnya, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP), Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak. Lembaga ini juga membawahi transfer kependudukan dan catatan sipil, yang melibatkan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta cerai. Untuk meningkatkan kualitas layanan, kantor ini telah meluncurkan aplikasi Dukcapil Smart Bantul, yang memungkinkan warga untuk mendaftar dokumen secara daring.

Selain itu, pemerintah telah menerapkan berbagai layanan inovatif untuk masyarakat. Salah satunya adalah SITUPAT Sapa 30 Menit (Situpat Sapa 30 Menit) menawarkan pelayanan terpadu dalam waktu singkat 30 menit kepada masyarakat. Kemudian ada program CEKATAN yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan KTP elektronik tanpa harus mengantri panjang, program AKSI SIMPATI yang mempercepat proses penerbitan akta kematian, program AKSI MESRA yang mempercepat penerbitan akta perkawinan, dan ada juga layanan mobile bagi mereka yang kesulitan mengunjungi kantor secara langsung.

3.3 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul telah mengadopsi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual untuk mengelola keuangannya. Implementasi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang mewajibkan semua badan usaha milik negara untuk menggunakan basis akrual dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Pada dasarnya, basis akrual mengakui, mencatat, dan menyajikan transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya dalam laporan keuangan ketika terjadi, bukan ketika kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan. Dengan cara ini, implementasi basis akrual memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja operasional pemerintah daerah.

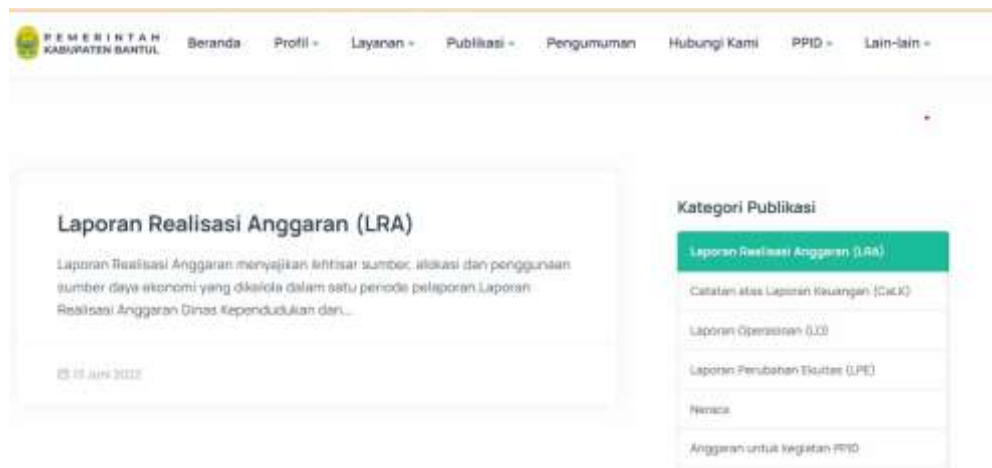
3.4 Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan

Pencatatan dan pelaporan keuangan, Disdukcapil Kabupaten Bantul menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, disingkat SIPD. Sistem ini dirancang sebagai platform terpadu yang menghubungkan seluruh unit organisasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan SIPD, setiap transaksi keuangan dicatat secara terstruktur, mulai dari bukti dokumen hingga penyusunan laporan akhir.

Manfaat utama penggunaan SIPD cukup beragam, seperti meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan, mengurangi risiko kesalahan, mempermudah pengawasan

dan penilaian anggaran, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mempercepat proses audit.

Melalui sistem SIPD ini, Disdukcapil Kabupaten Bantul telah menyusun laporan keuangan secara lengkap dan komprehensif sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kelengkapan laporan keuangan tersebut mencakup seluruh komponen yang dipersyaratkan dalam pelaporan keuangan sektor publik, yaitu Laporan Posisi Keuangan (LRA), Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit), Laporan Perubahan dalam Aktiva/Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kelengkapan ini menunjukkan komitmen Disdukcapil dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik secara optimal.



Gambar 3. Bukti Pembuatan Laporan

3.5 Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Di Disdukcapil Kabupaten Bantul, pengelolaan keuangan berhasil mengintegrasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas ini terlihat dari tanggung jawab yang jelas terhadap penggunaan anggaran, yang harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti lengkap dan dicatat dalam SIPD (Sistem Informasi Pengelolaan Data Daerah). Hal ini menjamin akuntabilitas yang baik.

Transparansi terlihat dari keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan. Informasi ini dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Anggaran dan realisasinya dicatat sepenuhnya dalam SIPD setiap periode. Ini memudahkan pemantauan dan evaluasi. Prinsip transparansi juga diterapkan dalam pelayanan publik melalui aplikasi daring. Di aplikasi ini, warga bisa melacak status permintaan dokumen mereka secara real-time.

3.6 Proses Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul melibatkan beberapa pihak. Ini termasuk Pemerintah Kabupaten Bantul, Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD), serta departemen perencanaan anggaran internal Disdukcapil. Proses ini dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan, mengembangkan rencana kerja dan anggaran, membahasnya dengan BPKAD, dan akhirnya menyelesaikan anggaran.

Kendala utama yang dihadapi adalah alokasi anggaran yang tidak cukup. Keterbatasan ini memberikan tantangan besar bagi Disdukcapil dalam melaksanakan berbagai program dan

kegiatan pelayanan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, instansi tersebut memprioritaskan pelayanan dasar yang penting bagi masyarakat. Mereka juga terus berusaha meningkatkan efisiensi anggaran yang ada.

3.7 Audit dan Pengawasan

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul secara rutin diaudit oleh berbagai lembaga pengawas, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK), Inspektorat Kabupaten Bantul, auditor eksternal untuk standar ISO, dan Kementerian Administrasi dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB). Audit ini dilakukan setiap tahun untuk memverifikasi bahwa pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Hasil audit menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Disdukcapil Kabupaten Bantul cukup solid. Tidak ada temuan besar terkait pengelolaan dana. Jika terjadi masalah, Disdukcapil segera mengambil tindakan korektif. Pada intinya, audit ini berfungsi sebagai alat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memastikan bahwa semua aspek dan persyaratan administratif terpenuhi dengan baik.

3.8 Penilaian Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan

Untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan kependudukan yang diberikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul mengacu pada tingkat pencapaian target pelayanan masyarakat. Salah satu metrik utama yang digunakan adalah pencapaian target pendaftaran KTP tahunan. Selama periode ini, Indeks Kualitas Basis Data (IKD) di Kabupaten Bantul mencapai 19,31 persen, tertinggi di antara kantor-kantor Dinas Kependudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Angka ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan Kabupaten Bantul memiliki data kependudukan berkualitas tinggi dan sistem pelayanan yang efektif. Data kependudukan yang akurat tidak hanya penting untuk keperluan administrasi sehari-hari tetapi juga menjadi landasan penting bagi perencanaan pembangunan daerah dan berbagai inisiatif pelayanan publik lainnya yang dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah daerah.

3.9 Peran dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Data kependudukan yang dihasilkan melalui layanan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berfungsi sebagai sumber informasi penting untuk perencanaan pembangunan daerah. Data yang akurat memberikan wawasan yang diperlukan untuk berbagai program, seperti yang berkaitan dengan kemiskinan, kesehatan, dan aspek lainnya. Berbagai instansi pemerintah daerah sering menggunakan data ini untuk merancang pembangunan daerah dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa Disdukcapil tidak hanya bertanggung jawab atas administrasi kependudukan tetapi juga berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pembangunan daerah. Manajemen data kependudukan yang solid, didukung oleh implementasi akuntansi sektor publik yang memadai, memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

3.10 Tantangan dan Upaya untuk Meningkatkan Kualitas

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Disdukcapil) Kabupaten Bantul adalah keterbatasan anggaran. Anggaran yang terbatas ini seringkali menghambat pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pelayanan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, Disdukcapil berupaya melaksanakan program sesuai anggaran yang tersedia, mengelola keuangan secara transparan, memastikan semua persyaratan administrasi terpenuhi, dan mengelola arus kas berdasarkan rencana yang telah disusun.

Meskipun demikian, Disdukcapil tetap berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan memprioritaskan pelayanan esensial. Mereka terus berinovasi untuk membuat pelayanan lebih mudah diakses dan berkualitas tinggi, misalnya melalui pelayanan sosialisasi, aplikasi Bold, dan program yang mempercepat proses pelayanan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, yang didukung oleh penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Pengelolaan dana yang dilakukan secara terencana, transparan, dan akuntabel menjadi kelebihan utama karena mampu mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan serta mendorong terciptanya berbagai inovasi layanan publik. Namun demikian, keterbatasan alokasi anggaran masih menjadi kekurangan yang berdampak pada ruang gerak pelaksanaan program dan pengembangan layanan. Oleh karena itu, pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada optimalisasi perencanaan anggaran, peningkatan efisiensi penggunaan dana, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas agar pengelolaan keuangan dan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan tugas ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Ibu Dr. Susilaningtyas Budiana Kurniawati, S.E, M.Si** selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, atas arahan, bimbingan, serta masukan yang diberikan selama proses penyusunan tugas.
2. **Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul**, atas kesempatan, izin, dan dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data.
3. **Ibu CH Siwi Budi Astuti, S.E.**, sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait penerapan akuntansi sektor publik dan pengelolaan keuangan.
4. **Bapak Wasis Basuki, S.Sos., M.M.**, sebagai narasumber yang telah memberikan penjelasan dan wawasan mengenai sistem pencatatan, pelaporan keuangan, serta pelayanan publik.
5. **Rekan satu kelompok**, atas kerja sama, kontribusi, dan dukungan selama proses pengumpulan data, diskusi, hingga penyusunan tugas ini.
6. **Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu**, yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya tugas ini

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, C. H. Siwi Budi. (2025). *Wawancara mengenai penerapan akuntansi sektor publik dan pengelolaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul*. Bantul: Disdukcapil Kabupaten Bantul.
- Basuki, Wasis. (2025). *Wawancara mengenai sistem pencatatan, pelaporan keuangan, dan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul*. Bantul: Disdukcapil Kabupaten Bantul.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. (2025). *Petunjuk Penggunaan Dukcapil Smart Bantul Versi 2.0* [berkas PDF]. Diakses 11 Januari 2026, dari <https://disdukcapil.bantulkab.go.id/hal/lain-lain-disdukcapil-smart-bantul-panduan-disdukcapil-smart-bantul>
- Khairani, S., Yulanda, K., & Sari, E. N. (2025). Peran Sistem Informasi Akuntansi dalam Tata Kelola Keuangan di Sektor Publik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 25(2), 57-66.
- Rizky, R. G. (2022). *Analisis Pengaruh Independensi, Profesionalisme dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)(Studi pada BPK-RI Perwakilan DIY)* (Doctoral dissertation).
- Salsabila, A. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm), Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Saputra, M. (2024). *Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen pada Proses Administrasi Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa* (Doctoral dissertation, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja).